

RINGKASAN

Virel Caswa Predanata. 2025. Peran badan permusyawaratan desa sebagai wadah aspirasi masyarakat Desa Kedungdalem untuk pembangunan pembangunan. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo. Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si, Nourma Ulva Kumala Devi, S.Sos., M.Sos,

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam pembangunan desa. Desa Kedungdalem di Kecamatan Dringu memiliki badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berperan mengakomodir aspirasi warga, membahas peraturan desa, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 pasal 55 dan Permendagri No. 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan dalam pembangunan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian antara lain ketua dan anggota BPD, aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran strategis dalam penyaluran aspirasi dan pengawasan pembangunan. Namun, fungsi aspirasinya belum berjalan optimal karena kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan anggota BPD tentang peran lembaga, minimnya forum aspirasi yang inklusif, lemahnya dokumentasi proposal, dan koordinasi yang kurang efektif dengan pemerintah desa.

Aspirasi yang dihimpun umumnya terkait perbaikan infrastruktur dasar, pengelolaan irigasi, dan peningkatan pelayanan publik, namun tidak semuanya diakomodasi dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPD di desa Kedungdalem sudah berjalan namun belum maksimal. Rekomendasi yang diusulkan antara lain peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan, pembentukan sistem pengelolaan aspirasi yang terdokumentasi, dan penguatan koordinasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mendukung pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: BPD, aspirasi masyarakat, pembangunan desa, partisipasi.